



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI IKN SETELAH MUNDURNYA KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IKN

Suhartono

Analisis Legislatif Ahli Madya
suhartono2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe, mengundurkan diri dari jabatan dua bulan menjelang rencana Presiden Jokowi menggelar upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN. Posisi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN kini diisi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, serta Wakil Kepala Otorita IKN diisi oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Usai ditunjuk Presiden menjadi Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono akan fokus pada permasalahan utama, yakni pertanahan dan investasi. Plt Kepala Otorita IKN dan Plt Wakil Kepala Otorita IKN akan mempercepat proses penentuan status tanah di IKN. Dengan adanya kejelasan status tanah, maka para investor diharapkan tidak ragu untuk menanamkan modalnya di IKN.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyarankan agar pemerintah menentukan Kepala Otorita IKN definitif yang akan datang dan bersikap transparan terkait pengunduran diri Kepala Otorita IKN sebagai strategi guna menjaga kepercayaan investor. Sedangkan Anggota Komisi V DPR RI, Irwan, mendorong Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita IKN definitif karena telah berpengalaman dari sisi anggaran, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan IKN di lapangan sejak awal. Hal ini dikarenakan sebagian besar pelaksanaan pembangunan IKN berada dalam tugas dan wewenang Kementerian PUPR.

Setelah mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN menjelang perayaan HUT RI ke-79 di IKN, terdapat sejumlah pembangunan yang diresmikan dan memasuki tahap uji coba. *Pertama*, Presiden Joko Widodo meresmikan lima proyek di IKN pada tanggal 4 Juni 2024. Proyek yang diresmikan, yakni Persemaian Mentawir dan Bendungan Sepaku Semoi, dilanjutkan dengan *groundbreaking* Astra Biz Center, Nusantara Botanical Garden, Al-Azhar Summarecon, dan Universitas Gunadarma. Presiden menekankan pentingnya rehabilitasi hutan, reklamasi bekas tambang, dan penanaman kembali secara efisien melalui Persemaian Mentawir. Selain itu, pemerintah akan meresmikan Bendungan Sepaku Semoi dalam rangka memenuhi pasokan air baku bagi air minum di IKN dan sebagian Kota Balikpapan, serta mengurangi risiko banjir di kawasan IKN. Bendungan Sepaku Semoi memiliki kapasitas tampung yang besar, mencapai 16 juta m³ dengan luas genangan mencapai 322 hektare. Sejumlah proyek yang diresmikan menunjukkan adanya penekanan pada pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN, dukungan investasi untuk mewujudkan visi pembangunan IKN, dan pentingnya fasilitas pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kedua, uji coba kereta otonom tanpa rel (*Automated Rail Transit/ART*) pada Agustus 2024. Proyek ini bagian dari penerapan konsep kota cerdas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kereta ini akan menggunakan teknologi terbaru yang memungkinkan pengoperasian tanpa rel, mengandalkan marka jalan dan magnet untuk navigasinya. ART memiliki kapasitas sekitar 324 penumpang per set kereta, kecepatan operasional akan mencapai 40 km/jam dan kecepatan maksimal 70 km/jam. *Ketiga*, pada tanggal 1 Agustus mendatang, Bandara IKN akan resmi

beroperasi, menandai salah satu langkah strategis dalam pengembangan infrastruktur di IKN untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, sekaligus mempercepat pembangunan di IKN. Bandara IKN dirancang untuk melayani penerbangan domestik dan internasional dengan fasilitas yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.

Proyek-proyek infrastruktur ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar IKN. Keberhasilan penyelesaian proyek-proyek ini tidak lepas dari kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Dengan beroperasinya Bandara IKN dan siapnya ART untuk diuji coba, langkah nyata dalam mewujudkan Ibu Kota Negara yang baru semakin terlihat, memberikan fondasi penting bagi pengembangan IKN dan harapan baru bagi percepatan pembangunan di Indonesia.

Atensi DPR

Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, serta perkembangan relaksasi rencana pembangunan IKN perlu mendapat perhatian dari Komisi V DPR RI. Kepemimpinan Otorita IKN perlu segera didefinisikan agar memberikan ruang yang pasti bagi realisasi sejumlah rencana yang sudah disusun untuk mempercepat infrastruktur yang diperlukan sehingga meningkatkan kepercayaan investor pada masa depan pembangunan IKN. Plt Kepala Otorita IKN yang dijabat oleh Menteri PUPR memperkuat posisi Komisi V DPR RI dalam pengawasan perencanaan dan pembahasan anggaran, karena sebagian besar proyek infrastruktur di IKN menjadi tanggung jawab Menteri PUPR. Komisi V DPR RI perlu menekankan pentingnya Kepala Otorita IKN yang definitif dan realisasi anggaran pembangunan infrastruktur di IKN dilaksanakan tepat waktu sesuai rencana, efisien, dan akuntabel. Komisi V DPR RI perlu memperoleh hasil evaluasi terkait anggaran, investor, konflik lahan dan lingkungan yang menghambat Pembangunan IKN.

Sumber

cnnindonesia.com, 4 Juni 2024;
detik.com, 7 Juni 2024;
Kompas, 6 Juni 2024; dan
tempo.co, 7 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.